

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pada tahun 2010 DPRD Kota Metro bersama dengan Pemerintah Kota Metro telah menyetujui 11 Raperda menjadi Perda, dari 11 Perda tersebut kesemuanya berasal dari Inisiatif Pemerintah Daerah Kota Metro dan tidak ada Perda yang berasal dari inisiatif DPRD Kota Metro, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 DPRD Kota Metro belum menjalankan fungsinya secara maksimal khususnya dalam fungsi legislasi dimana DPRD Kota Metro belum sama sekali menggunakan hak inisiatif yang mereka miliki untuk mengajukan suatu Rancangan Peraturan Daerah.
2. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota Metro adalah (1) Peraturan perundang-undangan, (2) Partisipasi masyarakat, (3) Pendidikan yang cukup memadai. Adapun faktor-faktor yang menghambat fungsi legislasi DPRD Kota Metro adalah: (1) Rekrutmen Parpol yang masih banyak dipengaruhi popularitas calon, keuangan, hubungan atau koneksi, (2) Anggaran yang minim untuk menyusun perda.

5.2 Saran

1. Melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD tentang kemampuan *legislatif drafting* sehingga peran DPRD dapat berjalan dengan maksimal.
2. Perlu kirannya disediakan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu yang menunjang fungsi DPRD.
3. Peningkatan anggaran untuk penyusunan Raperda inisiatif DPRD.
4. Agar sekretariat DPRD berperan aktif menunjang kinerja DPRD, seperti melengkapi perpustakaan dengan literature penunjang maupun sarana informasi lainnya seperti internet, dan web sehingga dapat lebih mempermudah anggota DPRD mendapat informasi dalam menjalankan fungsinya. dan mempermudah masyarakat mengakses segala sesuatu tentang DPRD Kota Metro

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kamus

- Ali Faried.1997.*Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislasi Indonesia*.PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Ashhoha, Burhan. 1998 . *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta; Jakarta.
- Bambang Yudoyono. 2001. *Otonomi Daerah;Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda Dan Anggota DPRD*.Pustaka Sinar harapan. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka; Jakarta.
- Hadi, Sotrisno. 1991. *Metodologi Reserch*. Andi Offse; Yogyakarta.
- I Nyoman Sumaryadi. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, CV. Citra utama.
- Kaloh. J. 2002. Mencari bentuk otonomi daerah(solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global.PT. Rineka Cipta.Jakarta.
- Josef R.kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*.PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Laksono Fajar Dan Subarjo.2006.*Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*.Balai Pustaka .Jakarta.
- Latif, Abdul. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (beleidsregel) pada Pemerintah Daerah*. UII Pres.
- Mahfud Moh MD , 2010, *Perdebatan HTN Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pres. Jakarta
- Maria farida indarti S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I*.Kanisius; Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti; Bandung. .
- Sekretariat DPRD Kota Metro, 2010, *selayang pandang dewan Perwakilan Rakyat Kota Metro priode 2009-2014*, sekretariat DPRD Kota Metro. Metro
- 2011.*Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2011*.Sekertariat DPRD Kota Metro.Metro.
- Yasir,Armen. 2008. *Hukum perundang-undangan*.Lembaga Penelitian Universitas Lampung;Lampung

----- . 2010. *Makalah Hukum dan Politik*. dalam perkuliahan hukum dan politik program studi S1 Universitas Lampung

Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)

Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Pemberluasan Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

C. Web

www. Hukumonline.com

www. Legalitas.org

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi_peran_fungsi_dprd.pdf

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081007054316AASOYFj>

Soekanto, 1997, dalam [http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum;di-](http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum;di-indonesia/)

[http://www.google.co.id/gwt/x?oe=UTF-8&q=faktor-](http://www.google.co.id/gwt/x?oe=UTF-8&q=faktor-faktor+yang+mempengaruhi+pembentukan+hukum&hl=id&ei=a50dToi4JJDQrQes6gE&ved=0CAsQFjACOAY&start=6&source=m&rd=1&u=)

[faktor+yang+mempengaruhi+pembentukan+hukum&hl=id&ei=a50dToi4JJDQrQes6gE&ved=0CAsQFjACOAY&start=6&source=m&rd=1&u=](http://www.google.co.id/gwt/x?oe=UTF-8&q=faktor-faktor+yang+mempengaruhi+pembentukan+hukum&hl=id&ei=a50dToi4JJDQrQes6gE&ved=0CAsQFjACOAY&start=6&source=m&rd=1&u=)

<http://www.scribd.com/doc/71415172/Sumber-Hukum-Formil-Materiil>